

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh tiga variabel independen yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah yang dilihat dari Belanja Daerah (BD) terhadap variabel dependen yaitu Ketimpangan Pendapatan berdasarkan Indeks Gini. Penelitian ini memiliki rentang waktu penelitian dari tahun 2007 – 2015. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Selama rentang waktu 2007 sampai 2015 perkembangan Ketimpangan Pendapatan di pulau Sumatera cenderung mengalami naik turun (berfluktuasi). Ketimpangan pendapatan antar Provinsi yang terjadi di pulau Sumatera digolongkan kedalam tingkat ketimpangan sedang, akan tetapi ada tiga Provinsi yang selama kurun waktu tersebut digolongkan kedalam tingkat ketimpangan tinggi. Tiga Provinsi tersebut yaitu Riau (0,40), Sumatera Selatan (0,40) dan Kepulauan Riau (0,41).
2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Ketimpangan Pendapatan. Sedangkan variabel Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel UMP berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan

sedangkan variabel Pengangguran berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

3. Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di pulau Sumatera dalam rentang waktu 2007-2015. Perbedaan yang cukup besar antar Provinsi dalam penetapan standar upah meningkatkan ketimpangan pendapatan yang terjadi. Sedangkan variabel pengangguran dianggap bisa mengurangi ketimpangan yang terjadi di pulau Sumatera pada tahun 2007-2015. Penurunan pengangguran merupakan indikasi yang baik, akan tetapi perlu diperhatikan apakah orang yang sebelumnya menganggur mendapatkan pekerjaan yang layak.
4. Variabel belanja daerah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di pulau Sumatera. Ketidakefektifan belanja daerah karena banyaknya belanja daerah yang tidak tepat sasaran atau lebih banyak belanja yang tidak berguna dari pada belanja yang sifatnya lebih ke arah pembangunan. Disisi lain, sektor swasta sangat dominan dalam mendorong perekonomian di Pulau Sumatera, sehingga belanja daerah tidak terlalu berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.
5. Hasil penelitian ini memperlihatkan ketimpangan pendapatan di pulau Sumatera nilai koefisien determinan R^2 sebesar 0,691824 atau 69 %. Artinya bahwa variabel ketimpangan pendapatan di pulau Sumatera dapat dijelaskan oleh variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), pengangguran dan belanja daerah dengan tingkat 69 %, sedangkan sisanya 31 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian.

6.2 Saran

Proses pembangunan yang dilakukan sebaiknya memperhatikan pemerataan didalamnya baik itu pemerataan pendapatan maupun pemerataan pembangunan.

Adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perbedaan upah minimum provinsi yang penetapannya tergolong cukup timpang di pulau Sumatera, maka untuk Provinsi yang memiliki upah minimum terendah seharusnya bisa menyesuaikan tingkat upahnya dengan Provinsi lainnya di pulau Sumatera.
2. Penurunan pengangguran merupakan sesuatu yang baik terhadap perekonomian daerah khususnya pulau Sumatera. Akan tetapi perlu diperhatikan kembali apakah orang yang sebelumnya menganggur mendapatkan kerja yang layak. Untuk itu rekomendasi kebijakan untuk pemerintah Provinsi di pulau Sumatera, perlu membuka lapangan pekerjaan yang memadai khususnya sektor informal, dengan cara membuka pelatihan pelatihan. Sehingga dengan soft skill yang dimiliki tenaga kerja bisa bekerja ditempat yang layak dan meningkatkan produktifitas dari tenaga kerja tersebut. Kebijakan lain yang perlu dilakukan pemerintah yaitu berupa pengembangan informasi pasar kerja. Dengan pengembangan informasi pasar kerja tersebut, maka kesempatan kerja juga terbuka lebar bagi semua penduduk, baik itu diperkotaan maupun pedesaan.
3. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrument dalam menurunkan ketimpangan. Akan tetapi hasil penelitian ini memperlihatkan koefisien yang negatif akan tetapi tidak signifikan, khususnya di pulau

Sumatera. Oleh karena itu, bagi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup besar, maka pemerintah tersebut seharusnya meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja daerah. Guna mencegah pembelanjaan yang tidak berguna, perlu pengawasan yang sangat ketat baik itu oleh pemerintah maupun peran bersama dari masyarakat. Sehingga pengeluaran pemerintah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di pulau Sumatera.

4. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di pulau Sumatera, dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan serta mengembangkan ekonomi ekonomi kreatif. Sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan dari tenaga kerja tersebut.
5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan tambahan mengenai topik ketimpangan pendapatan. Pembahasan mengenai ketimpangan pendapatan banyak variabel lain yang mempengaruhinya, untuk itu peneliti selanjutnya diharapkan untuk memasukkan atau menambahkan variabel lainnya di luar variabel dalam penelitian ini.

